

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian mengenai Peran Japan Foundation dalam diplomasi kebudayaan Jepang di Indonesia sebelumnya pernah ditulis oleh Iyul Yanti dari fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat itu penulis hanya memberikan secara umum bagaimana Peran *Japan Foundation* di Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini dari karya Iyul Yanti, disini Penulis akan lebih fokus mengenai peran *Japan Foundation* melalui *Anime* dalam menjalankan diplomasi kebudayaannya di Indonesia.

Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki kemajuan dan unggul dari segi teknologi, ekonomi, transportasi, budaya dan bahasa. Kemajuan Jepang juga menjadi panutan bagi negara-negara lain di Asia Tenggara (Lumbantobing, 2017). Pada perang dunia kedua serangan Amerika Serikat menjatuhkan bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki menjadi kekalahan Jepang yang saat itu sedang menjajah Indonesia. Pasca kekalahan dan kehancurannya, Jepang berupaya membangun kembali hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama negara-negara di kawasan Asia. Namun upaya ini tidak mudah dilakukan karena Jepang merupakan salah satu negara agresif yang menguasai dan menjajah negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara antara lain Cina, Mongolia, Taiwan, Korea Selatan, dan termasuk Indonesia (Armandhanu, 2015). Citra Jepang sebagai negara penjajah tidak mudah untuk dihilangkan.

Pasca perang dunia II, Jepang terus berusaha dibawah PM Shigeru Yoshida dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Jepang saat itu berfokus pada diplomasi ekonomi yang resmikan pada tahun 1957. Hubungan Diplomatik antara Jepang dan Indonesia akhirnya terjalin pada tahun 1958,

penandatanganan dan perjanjian perdamaian saat itu menjadi awal dinamika hubungan antara Jepang dengan Indonesia. Fakta perdamaian dan perjanjian pampasan perang antara Jepang-Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Ir. Soekarno dan Perdana Menteri Shinzo Abe (Kompasiana, 2012).

Hubungan bilateral kedua negara mulai terlihat erat dengan adanya berbagai persetujuan yang ditandatangani maupun pertukaran nota oleh kedua pemerintahnya, yang dimaksudkan untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Perjanjian pampasan perang ini bertujuan untuk menciptakan citra yang baik bagi Jepang terhadap Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya berhasil. Hubungan antar kedua negara masih dirasa renggang namun kerjasama tetap berjalan. Berbagai kesepakatan Jepang-Indonesia juga terjalin diantaranya "*Treaty of Amity and Commerce*" yang diratifikasi pada tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo, "Perjanjian Hubungan Udara" yang diratifikasi pada tanggal 23 Januari 1962 di Tokyo (Ayu, 2020).

Perubahan Indonesia menjadi orde baru dengan dilantiknya Soeharto menjadu presiden RI telah mengubah secara total berbagai kekurangan pada sistem kebijakan sebelumnya. Pada tahun 1965 di masa pemerintahan Soeharto, Indonesia telah mengalami inflasi sebesar 500% dan harga pangan seperti beras naik menjadi 900%, sedangkan defisit anggaran belanja negara saat itu hanya mencapai 300% dari pemasukan. Dalam kondisi ini presiden Soeharto salah satu cara tercepat yaitu segera mungkin mendapatkan bantuan luar negeri. Indonesia akhirnya membuka peluang investasi sebesar besarnya didasari dengan munculnya undang-undang penanaman modal asing (PMA) nomor 1 tahun 1967 dan juga undang-undang penanaman modal dalam negeri nomor 6 tahun 1968 yang dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan meningkatkan kembali dunia usaha swasta"(sumber).

Dana investasi Jepang menjadi yang terbesar dan mengalir ke Indonesia. Dengan adanya PMA, presiden Soeharto mulai mengadakan program yang bernama Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa Jepang telah merugikan Indonesia dan mematikan para pengusaha lokal Indonesia ditambahkan masih kurangnya kepercayaan rakyat terhadap Jepang akibat masa lalu kelam yang pernah terjadi antar kedua negara. Mahasiswa Indonesia khususnya di Jakarta melakukan aksi demonstrasi yang berpusat di Universitas Trisakti. Aksi ini bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia pada tahun 1974 dan kejadian ini disebut dengan peristiwa *malari*. Peristiwa ini berlangsung dengan tidak kondusif yang mengakibatkan adanya perusakan gedung-gedung serta kendaraan yang berbau Jepang menjadi sasaran mahasiswa dalam aksi protes. Krisis ekonomi dan politik juga menjadikan mahasiswa terdorong untuk melakukan gerakan ini dan menjadi bentuk protes terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap belum bisa mengatasi berbagai krisis dan penyimpangan yang terjadi.

Dengan kondisi seperti ini, Jepang mulai menggunakan kebudayaan untuk menciptakan suasana yang lebih damai dan bersahabat dalam hubungan antara Indonesia dengan Jepang untuk menghilangkan kesan bahwa Jepang merupakan negara *economic superpower*. Budaya sejatinya merupakan hasil karya cipta manusia yang memiliki ciri khasnya tersendiri dan diterima serta dinikmati oleh semua kalangan.

Pada Tahun 1972, Jepang mendirikan sebuah organisasi bernama *The Japan Foundation* dibawah MOFA (*Ministry of Foreign Affairs*) sebagai sebuah badan hukum yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan pertukaran kebudayaan antara Jepang dengan negara-negara lain di dunia guna memperkenalkan negara Jepang. Berdirinya *Japan Foundation* berpusat di Tokyo, dan mempunyai kantor cabang yang terletak

di Kyoto. Hingga saat ini, *Japan Foundation* telah mempunyai 23 kantor yang dimana sebanyak 21 kantor tersebar di beberapa negara. Untuk kawasan Asia Tenggara, *Japan Foundation* telah memiliki lima kantor cabang, yaitu di Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok, dan Hanoi (Nugraha, 2017).

Japan Foundation mengimplementasikan proyek pertukaran budaya internasional secara komprehensif di seluruh dunia. Tiga fokus utama dari kegiatannya adalah Pertukaran Seni dan Budaya (*art and cultural Exchange*), Pendidikan Bahasa Jepang di Luar Negeri (*Japanese Language Education Overseas*), dan Studi Jepang dan Pertukaran Intelektual (*Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange*). Dasar pendirian *Japan Foundation* adalah ketetapan khusus yang dibuat oleh Diet (parlemen Jepang) (Lubis, 1981).

Dalam mendirikan *Japan Foundation* memiliki alasan, yaitu untuk melakukan kerjasama internasional tidak hanya melalui ekonomi dan politik saja, melainkan perlu adanya kerjasama internasional di bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan kerjasama kebudayaan sangat penting bagi kepentingan nasionalnya, maka Jepang banyak mendirikan pusat kebudayaan melalui *Japan Foundation* di negara-negara yang dianggapnya penting untuk memperkenalkan kebudayaannya di mata dunia.

Peristiwa *Malari* pada tahun 1974 juga menjadikan Jepang untuk introspeksi terhadap kebijakan yang selama ini dijalankannya dan menjadi alasan yang melatarbelakangi *Japan Foundation* di Jakarta didirikan. Jepang ingin tetap membina hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya dengan Indonesia. Upaya Jepang ingin mempromosikan kebudayaan dan selalu menjalin hubungan baik terhadap Indonesia. *Japan Foundation* harus melalui beberapa proses dan tahapan terlebih dahulu karena untuk melihat reaksi masyarakat Indonesia terhadap Jepang mulai dari tahun 1974 setelah peristiwa *Malari* sampai tahun 1979. Tujuannya untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan

internasional yang lebih baik dan untuk memelihara serta meningkatkan kedekatan hubungan luar negeri Jepang.

Beberapa negara di dunia saat ini sebagian menggunakan *Soft Diplomacy* dalam mencapai tujuan nasionalnya. Bentuk dari *Soft Diplomacy* seperti kerja sama, bantuan, pertukaran pelajar dan kebudayaan merupakan bagian dari *Soft Diplomacy*, tidak perlu adanya unsur kekerasan untuk melakukan negosiasi. Joseph Nye menjelaskan bahwa cara dalam menarik perhatian suatu negara tanpa adanya ancaman atau kekerasan itulah yang disebut *Soft Diplomacy* (Saputra, 2017).

Keanekaragaman budaya Jepang membuat negaranya menjadi salah satu negara di dunia yang sangat aktif dalam mempromosikan berbagai kebudayaannya ke seluruh dunia. *Manga* dan *Anime* dapat dikatakan termasuk salah satu budaya Pop Jepang yang dapat mencuri perhatian masyarakat dunia. Industri media Jepang juga kolaboratif membuat *manga* dan *anime* menjadi konsumsi rutin masyarakat Internasional. Ketertarikan masyarakat terhadap *Manga dan Anime* juga tergambar seperti adanya *Cosplay* dari setiap karakter dalam *Anime* itu sendiri (sumber)

Japan Foundation menjadi wadah dan badan hukum bagi negara Jepang untuk mempromosikannya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun, pada tahun 2003 *Japan Foundation* berubah struktur menjadi lembaga administratif independen agar dapat menjadi organisasi yang lebih mandiri dalam melakukan kegiatan dan fokus terhadap pertukaran kebudayaan.

Dibentuknya cabang *Japan Foundation* diharapkan menjadi badan hukum bagi budaya pop salah satunya *Anime* Jepang dalam mempromosikan kebudayaannya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan. Sehingga penulis menetapkan pertanyaan pokok sebagai rumusan masalah penelitian, yaitu:

Bagaimana Japan Foundation berperan dalam mempromosikan kebudayaan Jepang di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran

Sebagai landasan untuk mempermudah memahami analisis permasalahan diatas, penulis menggunakan kerangka dasar, yaitu Konsep Diplomasi Kebudayaan

1. Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu Negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Diplomasi kebudayaan adalah upaya dinamis yang dilakukan dengan menggunakan konten budaya untuk kepentingan persatuan, kesatuan bangsa, dan pengakuan serta penghormatan luar negeri melalui kerjasama dan pertukaran budaya (Ditwtb, 2019).

Diplomasi kebudayaan mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pendapat bangsa lain, dalam upaya mencapai kepentingan nasional. Sarana diplomasi kebudayaan adalah segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk didalamnya sarana diplomatik maupun militer. Diplomasi kebudayaan menurut Wahyuni Kartika yakni: diplomasi yang memanfaatkan aspek

kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam pencatutan masyarakat internasional. Diplomasi kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Selain itu defenisi lain mengenai diplomasi kebudayaan adalah suatu teknik pemanfaatan dimensi kekayaan dalam pencatutan hubungan antar bangsa (kartikasari & warsito, 2007).

Tujuan utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (Masyarakat Negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat (suatu negara tertentu) dan masyarakat lain (negara lain). Sarana diplomasi kebudayaan adalah segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk didalamnya sarana diplomatik maupun militer.

Kebudayaan ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan internasional. Itulah sebabnya sejak dahulu suatu kebudayaan diperkenalkan para diplomat kepada masyarakat internasional untuk mempengaruhi atau memperbaiki sikap dan pandangan mereka terhadap negaranya. Hingga Jepang pun memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi.

Menurut S.L, Roy ada istilah yang lebih baku dari diplomasi kebudayaan yakni *Diplomacy By Cultural Performance*. Namun khalayak banyak terlanjur menekankan istilah yang sederhana yaitu diplomasi kebudayaan untuk memberi pengertian bahwa diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik. Tetapi diplomasi dengan mengatasnamakan budaya tidak selalu harus dengan budaya kuno atau tradisional sebab penggambaran secara makro dari diplomasi kebudayaan adalah usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya

memperjuangkan kepentingan nasional melalui unsur kebudayaan termasuk didalamnya pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, pendidikan, sosial budaya dan lain-lain dalam pencatutan masyarakat internasional (Soekanto, 2017).

Diplomasi kebudayaan sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dari pada keseluruhan usaha diplomasi yang sedang dijalankan pemerintah, yang pada hakekatnya bertujuan untuk memperkuat posisi nasional dan internasional negara dan bangsa. Dengan melaksanakan diplomasi kebudayaan ini kita mengharapkan akan dapat dipupuk saling pengertian, baik antara Jepang dengan dengan Indonesia (Fuad, 1983).

Didalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan, kebudayaan Jepang yang beraneka ragam itu tidak saja ditempatkan sebagai "subyek" akan tetapi juga sebagai "obyek". Sebagai subyek yaitu aneka ragam kebudayaan Jepang yang mencakup berbagai aspek seperti warisan budaya, kesenian, kondisi pendidikan dan ilmu pengetahuan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan diplomasi kebudayaannya di Indonesia.

Dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan, diperlukan adanya aktor atau para pelaku. Aktor dan pelaku diplomasi kebudayaan biasanya dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah, individu maupun kolektif, atau setiap negara sehingga pola yang terjadi berupa hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan swasta, swasta dengan pribadi, pribadi dengan pribadi, maupun pemerintah dengan pribadi. Yang mana tujuan dari diplomasi kebudayaan itu sendiri adalah untuk mempengaruhi pendapat umum guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu.

Definisi dari Diplomasi Kebudayaan yang dikemukakan oleh Milton Cummings, Jr adalah pertukaran ide-ide, informasi, seni, dan aspek-aspek lain dari budaya di antara bangsa-bangsa

dan masyarakat para manusia untuk mendorong saling pengertian (Lenczovvski, 2011).

Diplomasi kebudayaan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan bangsa dalam memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi (membangun citra) bangsa lain lewat kebudayaan. Diplomasi kebudayaan juga menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mencapai kepentingan bangsa, agar bangsa lain dapat memahami, mendapat informasi dan dapat dipengaruhi untuk kepentingan-kepentingan berbagai hal dari bangsa kita. Lebih dari itu juga sebagai *Soft Power* dan tidak hanya *Art Performance*. Pelaksanaan politik dengan diplomasi kebudayaan memanfaatkan hal-bal budaya, tanpa penggunaan kekerasan.

Tabel : Tabel Konsep Diplomasi Kebudayaan

Damai	-Eksebis -Kompetisi - Pertukaran nilai -Negosiasi -Konferensi	-Pengakuan -Penyesuaian - Persahabatan -Hegemoni	-Pariwisata -Olah raga -Pendidikan -Kesenian -Perdagangan
Krisis	-Propaganda -Pertukaran misi -Negosiasi	-Persuasi -Penyesuaian -Pengakuan -Ancaman	-Politik -Media massa -Diplomatik -Misi tingkat tinggi -Opini publik
Konflik	-Teror -Pertukaran misi -Boikot -Negosiasi	-Ancaman -Subversi -Persuasi -Pengakuan	-Opini publik -Perdagangan -Militer -Forum resmi -Pihak ketiga
Perang	-Kompetisi -Penetrasi -Teror	-Dominasi -Hegemoni -Ancaman	-Militer -Penyelundupan -Opini publik

	-Boikot -Penetrasi -Blokade -Propaganda -Embargo	-Subversi -Pengakuan -Penaklukan	-Perdagangan -Supply barang konsumtif termasuk senjata
--	--	--	---

Sumber: Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari., “Diplomasi kebudayaan konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang”.
Yogyakarta: Ombak, 2007, Hal 21.

Dengan sarana-sarananya berupa pariwisata, olahraga, pendidikan, perdagangan dan kesenian. Dari bentuk-bentuk tersebut kemudian tercipta tujuan berupa pengakuan, hegemoni, persahabatan, dan penyesuaian.

Dalam situasi krisis bentuk dari diplomasi kebudayaan sendiri berupa propaganda, pertukaran misi, dan negosiasi dengan sarana politik, media massa, misi tingkat tinggi dan opini publik sehingga terciptanya tujuan berupa pengakuan, persuasi, penyesuaian dan ancaman. Dalam kondisi konflik, diplomasi kebudayaan berbentuk teror, penetrasi, negosiasi dan boikot dengan sarananya yaitu opini publik, perdagangan, para militer, forum resmi dan pihak ketiga. Dan dalam situasi perang, bentuknya berupa kompetisi, teror, propaganda, embargo, boikot, dan blokade dengan sarana berbentuk militer, para militer, penyelundupan, opini publik, perdagangan dengan tujuan yaitu pengakuan, penaklukan, dominasi, ancaman, subversi dan hegemoni. Berdasarkan tabel dan penjelasan di atas, Japan Foundation organisasi pemerintah Jepang yang bergerak di bidang kebudayaan menjalankan program dan tujuannya dengan bentuk eksibisi, dengan mengadakan pameran dan berbagai macam festival yang diselenggarakan di Indonesia

2. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran tersebut, Penulis mengajukan hipotesis yakni, *Japan Foundation* berperan dalam meningkatkan citra baik Jepang terhadap Indonesia melalui:

- Penyelenggaraan eksepsi dalam mempromosikan kebudayaan Jepang di Indonesia dan program yang berhubungan dengan budaya, bahasa, dan pendidikan tentang Jepang.
- Adanya berbagai festival yang diselenggarakan untuk masyarakat Indonesia guna menarik kembali perhatian dan ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap Jepang.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan akademis yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mempromosikan kebudayaan Jepang terhadap Indonesia melalui organisasi *Japan Foundation*. Selain itu, dalam tulisan ini dibuat untuk membuktikan hipotesa penulis. Akan tetapi secara umum, tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa penulis, penelitian ini menggunakan data-data yang didapatkan melalui kepustakaan (library research) dan data – data dari website, Jurnal, E-Journal, media masa, serta dari berbagai sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis berupa teknik deksriptif dengan data kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deduksi, yaitu

dengan teori sebagai landasan analisa dalam memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

5. Jangkauan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup dan waktu. Tujuannya agar skripsi ini lebih fokus dalam membahas pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian ini memiliki jangkauan pada tahun 2008-2015.

6. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB 1: Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur metodologis karya ilmiah yang meliputi; latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

BAB 2 : Dalam bab ini, penulis menjelaskan hubungan Jepang-Indonesia, politik luar negeri Jepang serta pengenalan kebudayaan Jepang sejak masa penjajahan, hingga pasca kemerdekaan.

BAB 3 : Dalam bab ini, menjelaskan Profil dari *Japan Foundation* serta peran apa saja yang dilakukan *Japan Foundation* dalam memperkenalkan budaya Jepang terhadap Indonesia serta perkembangan *Japan Foundation* di Indonesia.

BAB 4 : Dalam bab ini, menjelaskan bagaimana *Japan Foundation* sebagai lembaga hukum budaya mengenalkan dan mempromosikan budaya Pop yaitu *Anime* di Indonesia.

BAB 5 : Dalam bab ini, menyediakan kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi dari peneliti. Kesimpulan disajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.